

## KEBANGKITAN MANDAR ABAD XVI-XVII *MANDAR'S RISE IN THE XVI-XVII CENTURIES*

**Abd. Rahman Hamid**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Jalan Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, 35131  
rahmanhamid@radenintan.ac.id

Naskah diterima 28-1-2022. Naskah direvisi 1-5-2022. Naskah disetujui 27-5-2022

### **ABSTRACT**

*This article examines Mandar's rise in the XVI-XVII centuries from three perspectives: supporting forces, dynamics, and existence. This study uses the historical method. Local sources are merged with suitable library assets to create the materials. The findings revealed that Mandar's resurrection was aided by kinship considerations and the Mandar bond with Makassar. The process reveals two patterns: first, inland and coastal integration from the early days to the founding of the Mandar confederation (Pitu Babana Binanga and Pitu Ulunna Salu); second, allies and adversaries in inter-kingdom ties in Mandar, relations with Makassar, the Netherlands, and Bone. The alliance of tiny political groups (tomakaka) and the kingdom responded to external pressures. The winning party (Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Mamuju, Tapalang, and Binuang) decides the destiny of the losing party (Passokkorang). The winning party may accept the people of the losing party due to the kinship connection. It demonstrates that cultural considerations are more effective in maintaining relationships between tribes and kingdoms. In 2004, the Mandar confederation territory was designated as the boundary of West Sulawesi Province.*

**Keywords:** *Mandar history, kinship, alliance, enmity, power*

### **ABSTRAK**

Artikel ini menjelaskan kebangkitan Mandar abad XVI-XVII dengan tiga fokus, yaitu faktor-faktor pendukung, dinamika, dan eksistensinya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Bahannya adalah sumber-sumber lokal yang dipadu dengan bahan pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebangkitannya ditunjang oleh faktor kekerabatan dan hubungan Mandar dengan Makassar. Dalam prosesnya memperlihatkan dua pola: Pertama, pola penyatuan pedalaman dan pesisir dari masa awal sampai terbentuk konfederasi Mandar (*Pitu Babana Binanga* dan *Pitu Ulunna Salu*); kedua, pola sekutu dan seteru dalam hubungan antarkerajaan di Mandar, hubungan dengan Makassar, Belanda, dan Bone. Persekutuan antara unit-unit politik kecil (*tomakaka*) dan kerajaan merupakan respon terhadap tantangan yang datang dari luar. Pihak yang menang (Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Mamuju, Tapalang, dan Binuang) menentukan nasib pihak yang kalah (Passokkorang). Karena faktor ikatan kerabat, rakyat dari pihak yang kalah dapat diterima oleh pihak yang menang. Ini menunjukkan bahwa faktor kultural lebih efektif menjaga kelanjutan hubungan antarkelompok dan kerajaan. Wilayah konfederasi Mandar dijadikan batas Provinsi Sulawesi Barat pada 2004.

**Kata kunci:** sejarah Mandar, kekerabatan, persekutuan, perseteruan, kekuasaan

## PENDAHULUAN

Studi tentang Mandar masih sangat terbatas dibandingkan Makassar dan Bugis. Bahkan Mandar kadang dimasukkan sebagai bagian dari Makassar atau Bugis. Padahal, sejarah asal-usul dan identitas budaya mereka berbeda. Dalam sumber lokal Mandar disebutkan bahwa leluhur orang Mandar menyebar dari Hulu Saddang (Toraja) ke Makassar, Luwu, dan Bone. Hal itu menunjukkan bahwa mereka mempunyai sudut pandang sendiri mengenai asal-usul dan identitas serta hubungan dengan Makassar, Luwu, dan Bone. Identitas Mandar menguat setelah terbentuk Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004. Apabila sejarah adalah satu album keluarga, setiap anggotanya berhak ditampilkan dalam album tersebut. Namun, dalam konteks ini, Mandar sebagai salah satu anggota keluarga belum tampak secara utuh dalam album sejarah Indonesia. Bahkan, Mandar cenderung dalam bayang-bayang Makassar dan Bugis. Implikasinya, meminjam konsep Susanto Zuhdi (2018), Mandar terabaikan dalam sejarah Indonesia. Jika sekarang Mandar sudah punya album sendiri, bagaimana cara mengisinya dan menggunakan perspektif apa?

Ada empat studi yang relevan dengan topik ini. Studi Amir dan Sahajuddin (2011) mengenai konfederasi Mandar yang dititikberatkan pada dinamika internal yang melahirkan penyatuan tujuh kerajaan di pesisir dan tujuh kerajaan di pedalaman. Kajian Poelinggomang (2012), mengenai sejarah Sulawesi Barat, memperkenalkan “periode kemandaran”, seperti pada karya pertama. Hanya pada karya kedua, ia memperkenalkan peran Mandar dalam kemajuan Makassar, namun tidak dianalisis lebih lanjut sampai perang Makassar untuk melihat hubungan Mandar dengan Makassar dalam periode-periode konflik politik. Penelitian Bahtiar (2016) menjelaskan pola

relasi Mandar dengan Bone pada abad XVII. Studi Hamid (2018) memfokuskan tentang proses pembentukan batas wilayah Mandar dari Sungai Paku di selatan sampai Sungai Suremana di utara.

Artikel ini membahas kebangkitan Mandar abad XVI-XVII. Periode ini sangat penting dalam sejarah lokal di Sulawesi bagian selatan dan barat. Mandar berada di tengah persaingan Gowa-Tallo (Makassar) dan Bone (Bugis). Persaingan tersebut tidak hanya melibatkan kekuatan lokal, tetapi juga kekuatan bangsa Eropa yang punya kepentingan di daerah ini. Sebelum perang Makassar (1666-1669), Gowa-Tallo merupakan kekuatan ekonomi dan politik dominan yang dilukiskan Anthony Reid (2004, 132) sebagai suatu kisah sukses paling cepat dan spektakuler dalam sejarah Indonesia. Mandar, dalam hal ini, merupakan sekutu Makassar. Setelah perang tersebut, Bone menjadi kekuatan politik utama di jazirah selatan Sulawesi. Perubahan ini berpengaruh terhadap eksistensi Mandar sebagai sekutu dari pihak yang kalah perang (Makassar).

Berpijak dari pemikiran di atas, studi ini mencoba menjawab tiga persoalan berikut: *pertama*, faktor-faktor apa yang menunjang kebangkitan Mandar? *kedua*, bagaimana proses kebangkitan Mandar dan dinamikanya? Bagaimana eksistensi Mandar ketika dan setelah perang Makassar? Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis menggunakan sumber lokal (*lontara*) Mandar dan Makassar.

## METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Empat sumber lokal Mandar yang digunakan adalah *Lontara Pattodioloang* (Syah 1993), *Lontara Pattappingang* (Yasil 1984) *Lontara Mandar* (Disporabudpar 2010), dan *Lontara Pamboang* (Sinrang 2000).

Sedangkan lontara Makassar dari Gowa dan Tallo, yaitu *Lontarak Bilang Raja Gowa dan Tallok* (Kamaruddin et al 1986), *Lontarak Patturioloang Tutalloka* (Manyambeang dan Mone 1979), *Sedjarah Gowa* (Wolhoff dan Abdurrahim 1956), dan *Sejarah Kerajaan Tallo* (Rahim dan Borahima 1974). Selain itu juga digunakan *Syair Perang Mengkasar* (Amin and Skinner 2008) dan *Suma Oriental* (Pires 1944). Semua sumber tersebut sudah diterbitkan.

Sumber lokal Mandar digunakan untuk menganalisis kondisi dan dinamika internal yang menginspirasi lahirnya persekutuan dan perseteruan unit-unit politik lokal sebelum terbentuknya konfederasi kerajaan-kerajaan di Mandar. Sumber lokal Makassar terutama untuk menjelaskan relasi Mandar dengan Makassar dan Bone sebelum dan pada saat perang Makassar. Sumber tersebut dianalisis sesuai dengan kondisi umum pada masa itu sehingga diperoleh fakta sejarah. Peristiwa perang Makassar (1666-1669), dalam konteks periodisasi, dijadikan sebagai tonggak waktu untuk menjelaskan keadaan sebelum dan setelah peristiwa sesuai rumusan pertanyaan penelitian. Fakta tersebut kemudian dirangkai menjadi kisah yang disusun secara kronologis dan imajinatif (Hamid and Madjid 2011, 51–52).

## PEMBAHASAN

### Faktor-faktor Pendukung

Cikal bakal kebangkitan Mandar terkait erat dengan keberhasilan merespons dinamika politik internal di Mandar dan hubungan eksternal dengan Makassar. Secara internal terdapat asal-usul komunitas dan kekuasaan di Mandar, baik daerah pesisir maupun pedalaman, yakni bermula dari hulu Sungai Saddang Toraja kemudian menyebar ke seluruh wilayah Mandar. Dalam proses penyebaran itu terbentuk kesatuan sosial dan politik kecil yang saling bersaing untuk

menjadi lebih unggul yang melahirkan dinamika persekutuan dan perseteruan internal. Dinamikanya semakin kompleks setelah jaringan kekuasaan dan kekerabatan Mandar diperluas ke luar (eksternal) terutama dengan Makassar yang saat itu sedang tumbuh menjadi kekuatan politik dan ekonomi di jazirah selatan Sulawesi. Lebih lanjut diuraikan pada subbahasan berikut.

### 1. Ikatan kekerabatan

Berdasarkan sumber lokal Mandar diketahui bahwa proses pembentukan Mandar sebagai satu identitas budaya dan politik berawal dari kedatangan seseorang di hulu Saddang Toraja, yang dikenal sebagai *Tunipanurung di Langiq* (manusia yang turun dari langit). Dia menikah dengan seorang gadis yang bergelar *Tokombong di Bura* (manusia yang muncul di atas busa air). Dari perkawinan ini lahir anak keturunan mereka yang kemudian menyebar ke berbagai daerah di Mandar, Makassar, dan Luwu (Yasil 1984, 204–5).

Salah satu generasi ke-16 dari *Tunipanurung* di atas adalah Padorang. Ia memiliki dua anak laki-laki dan dua perempuan. Seorang laki-laki bernama I Pongkapadang yang dikenal sebagai “Bapak” Mandar. Dari isteri pertamanya, Saka Bone melahirkan dua anak, yakni Sambadatuk dan Mambuliling. Mereka meninggalkan hulu Saddang ke arah barat menetap di sekitar Gunung Landa Banua, tepatnya Bulu Mappa. Dia membawa sejumlah benda pusaka, yakni keris *kallang*, klewang *tambaroang*, dan sebuah gong putih. Dari sana mereka melihat asap membumbung tinggi di atas Gunung Kapusaan. Setelah dicek oleh Pongkapadang ternyata ada seorang perempuan *Torijene* (secara harfiah berarti orang dari laut) dan kakaknya yang datang dari pantai. Perahu mereka terdampar di puncak gunung itu saat terjadi banjir besar. Pongkapadang kemudian

kembali ke Landa Banua. Dia menemukan anaknya sudah meninggal dan dimakamkan di sana sehingga gunung itu dikenal dengan nama Mambuliling. Akibat musibah itu dia dan keluarganya kembali ke hulu Sadang. Di tempat itu isterinya meninggal dunia (Leyds 1940, 17–18; Buijs 2009, 22–24).

Sebelum kembali ke Landa Banua, Pongkapadang menikah untuk yang kedua kali dengan Lambe Susu. Anaknya dari isteri pertama, Simbadatu, ikut bersama Lambe Susu ke Kalumpang.<sup>1</sup> Pongkapadang menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan *Torijene* di Kapusaan (Tabulahan) sehingga lahir tujuh orang anak. Dari seorang anaknya, yakni Daeng Manganna melahirkan sebelas anak dan setelah mereka dewasa menyebar ke berbagai daerah di Mandar, yaitu Sahalima ke (Tabang), Makadaeng (Mamuju), Daeng Tumanang (Tabulahan), Tambusisi (Tapalang), Takahabatu (Simboro), Daeng Malulung (Tubie), Daeng Matana (Mambie), Tammi (Bambang), Taajoang (Matanga), Tababina (Lohe-Kalumpang), dan Takayang Pudung (Sumahu-Malunda). Dari keturunan mereka inilah lahir raja-raja di Mandar (Leyds 1940, 18–19; Buijs 2009, 25).

Seiring persebaran dan penambahan anggota di satu tempat, terbentuk kepemimpinan lokal berbasis kharisma individu yang disebut *tomakaka* (*to* “orang, *makaka*” dianggap kakak). Oleh karena jumlah anggota kelompok masih sedikit, seorang pemimpin cenderung mengurus

<sup>1</sup> Penelitian arkeologi menemukan Kalumpang adalah pemukiman yang sudah teratur sejak abad II sampai VII M, ditandai sistem kekuasaan Tomakaka Kalumpang (bakal Kerajaan Mamuju). Di sana ditemukan patung Budha dari perunggu dengan langgam Amarawati dari India Selatan yang dibawa pedagang yang melintas Selat Makassar, masuk ke pedalaman melalui aliran Sungai Karama sampai tiba di Sikendeng. Aliran sungai itu terhubung dengan Sungai Saddang yang berhulu di Toraja. Sebagian penduduk Kalumpang kemudian pindah ke Toraja dan Luwu akibat invasi dari luar atau penyakit (Rahman 1988, 168–69; Mahmud and all 2019, 24, 27).

semua bidang kehidupan. Dia melahirkan kekuasaan dalam arti luas berupa wewenang, wibawa, dan kharisma yang tercermin melalui sifatnya yang terpuji. Ia mampu menyelesaikan segala permasalahan melalui sifat pengayom dan mampu mengendalikan diri untuk kepentingan banyak orang. Oleh karena itu *tomakaka* dianggap sebagai penjelmaan roh nenek moyang yang patut dihormati. Kuburnya dipandang bertuah atau *tosalama* (Rahman 1988, 169–70).

Sampai akhir abad XV terdapat 41 *tomakaka* di Mandar, mengikuti urutan waktu kelahirannya, yaitu Ulu Sadang, Motting (Botang), Rantebulahan, Lembangmapi (Allu), Makula (Pembusuang), Salimbobo (Sambobo Ulu Mandak), Langge (Mapili), Butubulawang, Garonbang (Bulo, Mapili Utara), Taramanu, Pajosang (Napo), Saragian (Allu), Ambopadang (Tubbie), Kalapa Duwa (Meliwati Kunyi), Passokkorang, Melandi (Campalagian), Karamangang, Titie (Mapili), Lerang-lerang, Napo, Pongale (Samasundu), Sajoang (Allu), Salarri (Limboro), Loppeng (Renggeng), Puttanganor (Allu), Patui (Tandasura), Tande (Majene), Salabose (Majene), Butupau (Pambauwang), Sonde (Tappalang), Putada (Cenrana), Seppong (Ulumandak), Tabang (Timur Laut Mamasa), Balobong (Pambauwang), Puabang (Majene), Binuang, Lebani (Mamuju), Kalukku (Mamuju), Kalumpang, dan Lemo (Mamuju). Kecuali pedalaman, pusat *tomakaka* pesisir pada umumnya di perbukitan dekat pantai (Leyds 1940, 24–25).

Ikatan kerabatan antara *tomakaka* tersebut memudahkan jalan penyatuan seperti Napo, Samasundu, Mosso, dan Todangtodang bersekutu menjadi “Empat negeri besar” (*Appe Banua Kaiyang*) sebagai cikal bakal Kerajaan Balanipa. Proses ini mengikuti perkembangan kehidupan yang semakin kompleks sehingga lahir tipe pemimpin baru, yakni *papuangan* (seseorang yang disapa

puang). Kalau tipe lama kekuasaan individu bersifat kharismatik, pada tipe baru seseorang pemimpin mempunyai otoritas terbatas yang didampingi para pemuka masyarakat, seperti zaman *tomakaka*, untuk menangani urusan tertentu seperti tanah dan sosial (*tomabubeng*), keamanan (*andongguru*), dan upacara (*poambi*) (Rahman 1988, 178–81).

Hubungan antara *tomakaka* tidak hanya dalam bentuk persekutuan tetapi juga perseteruan. Dari proses itu lahir lima kekuatan besar, yang dipandang kejam oleh yang lain, yaitu Passokkorang, Titting, Lenggoq, Lamboq, dan Sajoang. Dari lima kekuatan itu, Passokkorang dipandang sebagai yang paling kuat dan kejam. Passokkorang berada di dekat aliran Sungai Maloso (Mappili), sungai besar yang bermuara di Teluk Mandar, yang memberikan kesuburan bagi tanah sekitarnya untuk pertanian. Ia adalah kerajaan besar di Mandar. Ceritanya menarik sehingga sering disampaikan dalam acara perkawinan, kematian, dan sebagainya di Mandar (Syah 1980).

Kendati Passokkorang dianggap kuat dan kejam, namun ia hanya disebut secara singkat dalam lontar Mandar sehingga sejarahnya kadang sulit direkonstruksi secara utuh. Dalam kronik Gowa dikenal sebuah kerajaan di daerah Mandar, yakni Bilabilami. Kerajaan ini membawahi Bungka, Mapilli, Podapoda, dan Tjampalagian. Ia pernah ditaklukan oleh Raja Gowa Tunipalangga (1546-1564). Raja Kerajaan Bilabilami dikenal sebagai “raja besar di Mandar” (*karaeng lompoa ri Mandara*) (Wolhoff and Abdurrahim 1956, 28). Penulis menduga bahwa yang dimaksud dengan Bilabilami adalah Kerajaan Passokkorang dengan dua pertimbangan berikut, *pertama*, Bilabilami disebut sebagai kerajaan paling besar dan kuat di Mandar, sebelum lahirnya Kerajaan Balanipa; dan *kedua*, empat daerah bawahan Kerajaan Bilabilami secara geografis berada di kawasan Kerajaan Passokkorang.

Tindakan Passokkorang yang kejam membuat raja pertama dan kedua Balanipa, I Manyabungi (memerintah sekitar 1550-1580) dan Tomepayung (1580-1610), berupaya menghancurkannya. Sebelum pertemuan di Tammajarra II<sup>2</sup> pada masa pemerintahan Tomepayung, tiga kekuatan politik lokal bersekutu (Sendana, Allu, dan Taramanu) secara bersama-sama menyerang Passokkorang (Sinrang 2000, 34). Pertemuan tersebut melahirkan persekutuan tujuh kerajaan di pesisir atau muara sungai, yaitu Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Mamuju, Tapalang, dan Binuang, yang dikenal dengan Konfederasi *Pitu Babana Binanga* (Tujuh Kerajaan di Muara Sungai). Oleh karena faktor ikatan kerabat, setelah kehancuran Passokkorang, tujuh kerajaan Mandar pesisir sepakat menerima kehadiran rakyat Passokkorang dengan baik di wilayah masing-masing (Yasil 1984, 277).

## 2. Hubungan Mandar dengan Makassar

Awal hubungan Mandar dengan Makassar terjalin melalui pelayaran dan perdagangan. Hubungan tersebut berkembang tidak hanya dalam bidang pertukaran barang, tetapi juga ikatan kekerabatan antara kedua belah pihak melalui perkawinan. Pada akhir abad XV seorang putri Mandar bernama I Rerasi tiba di bandar Tallo. Menurut tradisi lisan Gowa, dia adalah putri bangsawan Napo Balanipa yang ikut dengan para pedagang kapur dari Palenggu (Turatea) saat mereka berdagang di Mandar. Ketika tiba di Tallo, I Rerasi diambil dan dipelihara oleh raja. Setelah tumbuh dewasa ia dinikahi oleh Raja Gowa VI Batara Gowa (1460). Dari perkawinan ini lahir Karaeng Tumaparrisik Kallonna dan Karaeng Makeboka (Patunru 1983, 10, 153; Wolhoff and Abdurrahim 1956, 15).

<sup>2</sup> Pertemuan di Tammajarra pertama pada masa Tomepayung menghasilkan persekutuan tujuh kerajaan pesisir (*Pitu Babana Binanga*) di Mandar.

Setelah Tumaparrisik Kallonna menjadi Raja Gowa IX, ia memperluas orientasi kerajaan pada sektor maritim yang ditandai pemindahan ibu kota kerajaan dari Bukit Tamalate ke pesisir, sekitar muara Sungai Jeneberang, lalu membuka pelabuhan Somba Opu di bawah seorang syahbandar. Untuk memperkuat kedudukan Gowa, raja ini membangun persekutuan dengan Raja Tallo Tunipasuru dalam ikrar “satu rakyat, dua raja” (*se'reji ata, narua karaeng*) yang diperkuat sumpah bahwa “barang siapa yang mengadu-domba Gowa dan Tallo akan dikutuk Dewata.” Gowa menyumbangkan kekuatan militer dan Tallo membawa jaringan saudagar asing dan teknologinya yang maju. Pelabuhan Somba Opu dan Tallo dikunjungi para pedagang Jawa, Melayu, dan Portugis (Rahim and Borahima 1974, 11; Reid 2004, 150–51).

Perluasan orientasi Gowa pada perdagangan maritim, menurut Poelinggomang (2012, 84–85), tak lepas dari pengaruh Mandar. Pada diri Tumaparrisik Kallonna mengalir darah keluarga pedagang dari ibunya. Oleh karena itu, ketika Melaka ditaklukan Portugis pada 1511, yang memaksa para pedagang muslim Melayu meninggalkan negerinya untuk mencari pelabuhan lain, dia segera membuka pelabuhan baru Somba Opu dan mengintegrasikan pelabuhan lama Tallo di bawah kekuasaannya. Pada masa ini datang seorang bangsawan Napo, putra Puang di Gandang dari isterinya I Weapas (putri Tobittoeng), bernama I Manyambungi bersama tiga puluh pengikut dan keluarganya. Neneknya (Tobittoeng) bersaudara dengan I Rerasi. Oleh karena itu, kehadirannya disambut oleh Raja Gowa (Saharuddin 1985, 43; Yasil 1984, 205).

I Manyambungi menjadi tentara kerajaan (*djoa*). Dia menikah dengan cucu Raja Gowa, Karaeng Suria (putri Karaeng Sanrabone), dan mendapat sepucuk tombak naga dari raja. Dari perkawinan itu lahir

empat orang anak, yaitu seorang putra bernama Tomepayung yang kelak menjadi Raja Balanipa yang kedua dan tiga putri yang tidak diketahui namanya.<sup>3</sup> Seorang putri menikah di Makassar dengan Raja Tanete, seorang bersuami ke Bima, dan seorang lagi tidak diketahui (Saharuddin 1985, 43). Manyambungi ikut berperang dalam merebut Tambora di Pulau Sumbawa, yang sudah ditaklukan dalam abad XV, karena tidak patuh kepada Gowa (Leyds 1940, 28).

Peristiwa ini disebut dalam lontar *Pattodioloang* (Syah 1993, 36) sebagai berikut:

*Nasalami pakkasiwiang setaung to Tambora. Macai'mi karaeng di Gowa. Nalambai Tambora. Polei sau rumpa'mi Tambora. Panno tolorammi inggannana anna' Puang. Diatomitia naita Todilaling tobaine massoppo gong, nabawa tama di liang, lao tomi tia nala.*

Terjemahan:

Orang Tambora lalai pada kewajibannya. Marahlah karaeng [raja] di Gowa. Tambora lalu diserang. Runtuhlah Tambora. Semua pimpinan pasukan dan anak punya hasil. Todilaling juga melihat wanita memikul gong dibawa ke goa. Ia lalu mengambilnya

Kontribusi lain dari Manyambungi untuk Gowa adalah saat berperang dan berhasil menaklukan Luwu.<sup>4</sup> Setelah perang itu dia kembali ke Makassar membawa dua buah gong (bernama *I Naga* dan *I Katapang*). Lebih lanjut, dia menjadi penasihat kerajaan ketika ekspedisi Kerajaan Gowa ke Pariaman, Sumatera Barat (Saharuddin 1985, 43; Sinrang 2000, 29–30). Pasca ekspedisi yang terakhir,

<sup>3</sup> Dalam lontara *Pattapingang* disebut punya empat anak: seorang putra (Tomepayung) dan tiga putri. Seorang putri menikah dengan raja Tanete di Makassar, dua orang lainnya kembali ke Mandar dan menikah di Todang (yang mewarisi Napo) dan Alu (mewarisi Takalimbuaq) (Yasil 1984, 207).

<sup>4</sup> Menurut Patunru (1983, 13) Raja Gowa X Tunipalangga Ulaweng (1546-1565) menaklukan Luwu dan kemudian membuat perjanjian persahabatan dengan rajanya.

dia mempersiapkan diri untuk kembali ke Mandar. Dia membuat sebuah perahu *biseang palari*. Perahu jenis ini digunakan sebagai armada kerajaan-kerajaan di Mandar. Sejalan dengan itu, keluarganya dari Mandar juga tiba di Gowa untuk mengajaknya pulang. Mereka bertemu dengan Manyambungi di tempat pembuatan perahu. Sebelum ke Mandar, dia bertemu dengan raja. Keduanya lalu mengikrarkan janji setia untuk saling membantu kelak bila menghadapi masalah. Berikut petika ikrarnya:

*Muaq ttiroko-i manuq muanene litaq di Gowa, mai leqbaq-0 (Mandar) pellingea, mau inngando-o Maqassar. Uppanna-uppanna diang na mallattalatta petawung di litaq Mandar, inggannana gassunna lita Gowa, na metturundo nasangai na mappakalewa litaq Mandar.*

Terjemahan

Jika ayam jantan dari kerajaan Gowa berkokok, Mandar harus menjenguknya, namun sampai di Makassar saja.

Bilamana ada yang hendak menghancurkan tanah Mandar, maka segenap kekuatan tanah Gowa akan membantu Mandar (Sjafruddin 1989, 279).

Ketika kembali ke Mandar, Manyambungi membawa sejumlah atribut kekuasaan dari Gowa yaitu gong *tabilowe*, tombak naga, dan bedil tata ke Mandar. Selain itu juga panji serai, tombak trisula *doe pakim*, mahkota saloko kati, gong *i dato*, seruling keke, tambur gandrang, perisai *utte*, dan alat musik *jalappa* (Leyds 1940, 28–29). Setelah beberapa hari dia berlayar dari Makassar, perahunya pun tiba di *paroppong* (tempat nelayan penangkap ikan besar). Gong *taqbilowe* dipukul keras sehingga terdengar oleh penduduk Tallo dan sekitarnya. Ia naik ke darat menemui penduduk untuk

menanyakan tentang keberadaan lima raja (Passokkorang, Titting, Lenggoq, Lomboq, dan Sajoang) yang sering mengganggu ketentraman hidup penduduk Napo. Setelah membunuh semua raja tersebut, dia berusaha mengatur kehidupan penduduk menjadi lebih kondusif. Usahanya mendapat dukungan dari saudara tirinya, Puang di Pojosang.

Sebelum Manyambungi dilantik menjadi Raja Balanipa, para kepala pemerintahan (*papuangan*) dari Empat Negeri Besar (*Appe Banua Kaiyang*), yaitu Napo, Samasundu, Mosso, Todangtodang melantik Pajosang menjadi anggota hadat Kerajaan Balanipa dengan gelar *pepuangan limboro*, kemudian kemanaannya bergelar *pepuangan tammangalle* atau *biringlembang* (Saharuddin 1985, 45–46). Kaum adat melengkapi aparat dan pembantu raja dengan sejumlah keterampilan khusus mulai dari pengasuh, tukang kayu, pembuat alat-alat logam, alat batu, alat besi, dan pembuat alat kesenian pengukir serta pembuat layar perahu.

Manyambungi dilantik menjadi raja (*maradia*) pertama Balanipa yang memerintah mulai awal sampai paruh kedua abad XVI (Leyds 1940, 31). Sejak itu lahir sapaan *daeng* bagi raja dan keturunannya serta *puang* bagi kaum hadat. Kedunya adalah bangsawan Mandar (Rahman 1988, 5–6). Setelah istri yang pertama meninggal, Karaeng Surya, kawin lagi dengan putri bangsawan Napo. Dari perkawinan itu lahir seorang putra bernama Todijallo dan dua putri (Yasil 1984, 207).

Sebelum akhir kekuasaannya, Manyambungi memindahkan pusat pemerintahan dari pedalaman Napo ke pesisir, dekat muara Sungai Balanipa, sekarang Sungai Mandar (Rahman 1988, 69). Dengan demikian terjadi perluasan orientasi Kerajaan Balanipa, yang semula bercorak agraris, menjadi maritim guna merespon

perkembangan perdagangan maritim di Selat Makassar. Pola ini mirip dengan pengalaman Gowa-Tallo menuju dominasi politik dan ekonomi di jazirah selatan Sulawesi setelah mencurahkan perhatiannya pada perdagangan maritim. Raja Balanipa berikutnya adalah Tomepayung yang terus membina hubungan baik dengan Makassar yang sudah menjadi pelabuhan utama di kawasan timur nusantara.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Mandar memiliki kontribusi penting dalam perkembangan Makassar menjadi kekuatan ekonomi dan politik maritim, sejak kehadiran I Rerasi di pelabuhan Tallo yang melahirkan Raja Gowa yang bervisi maritim, yakni Tumaparrisi Kallonna. Kehadiran keluarga I Rerasi, yakni I Manyambungi dan pengikutnya dari Mandar, di Makassar menambah kemajuan Makassar menjadi kekuatan politik yang utama di jazirah Selatan Sulawesi. Proses tersebut memperkaya pengetahuan dan keterampilan I Manyambungi yang kelak menjadi pendiri dan raja pertama Kerajaan Balanipa di Mandar. Pada konteks ini, tampak silang dukungan serta pengalaman dalam proses kebangkitan politik dari kedua belah pihak, Mandar dan Makassar, yang mempengaruhi arus sejarah ketika Perang Makassar (1666-1669).

### **Kebangkitan Mandar**

Awal kebangkitan Mandar ditandai pemindahan pusat pemerintahan Balanipa dari pedalaman ke pesisir yang disertai pembukaan dua pelabuhan kerajaan, Para dan Babarura, di muara Sungai Mandar. Pelabuhan ini di bawah pengawasan seorang syahbandar (*sawannara*). Barang-barang dari pedalaman (kayu, rotan, dan berbagai bahan tali temali) dibawa melalui sungai dengan rakit menuju pelabuhan. Sebaliknya barang-barang dari daerah seberang (garam, tembakau, beras, kain, barang pecah belah, dan sebagainya)

dibongkar di pelabuhan. Pelabuhan menjadi pusat perdagangan yang umumnya dilakukan dengan barter. Kerajaan bertanggung jawab atas keamanan semua pedagang. Dari kegiatan ini, kerajaan memperoleh sumber pendapatan yang selanjutnya digunakan untuk mengatur negeri dan mengumpulkan kekuatan (Rahman 1988, 71).

Raja Balanipa kedua, Tomepayung, menata struktur pertahanan kerajaan dengan membentuk angkatan perang yang terdiri atas empat unsur (*appe'jannangan*), yaitu pasukan infanteri (*andongguru pakkambusu*), pasukan bersenjata (*andongguru passinapang*), pasukan sumpit (*andongguru pa'burasang*), dan pengawal istana (*andongguru joa' matowa*). Para pemimpin kesatuan diambil dari masing-masing kaum adat yang berada di bawah komando tertinggi Perdana Menteri (*Maradia Matoa*) yang dijabat oleh Tonijallo, adik Tomepayung (Rahman 1988, 282; Sewang 2012, 27–28).

Perdagangan ramai pada masa pemerintahan Tomepayung sehingga Kerajaan Balanipa mencapai kemakmuran yang tinggi (Leyds 1940, 31). Hubungan niaga dengan daerah lain terutama Makassar dan Bugis terjalin dengan baik. Balanipa tumbuh menjadi pusat perdagangan di Teluk Mandar, yang berfungsi sebagai pusat pengumpul (*collecting centres*) bagi pelabuhan utama (*entrepot*) Makassar. Sebagai pusat pengumpul, Balanipa memiliki empat ciri, *pertama*, mempunyai pelabuhan alam yang baik; *kedua*, merupakan tempat persinggahan yang dilengkapi bahan pangan dan berfungsi sebagai pasar lokal; *ketiga*, merupakan tempat yang baik dan memiliki pedalaman yang kaya; dan *keempat*, merupakan emporia besar di kawasannya dan tempat perakitan barang-barang dari *feeder point* (Heng 1990, 23; Zuhdi 2018, 52–53). Barang-barang keluar dari Balanipa dibawa pedagang Mandar, Makassar, dan Bugis ke

Makassar. Atas usaha mereka pula, barang-barang dari Makassar tiba di Balanipa.

Kemajuan perdagangan maritim perlu didukung oleh kerajaan-kerajaan lain di pesisir dan pedalaman Mandar. Oleh karena itulah, Tomepayung mengadakan pertemuan di Bukit Tammajarra, wilayah Kerajaan Balanipa, yang dihadiri oleh enam raja pesisir, yaitu Tomepayung (Balanipa), Puatta di Kuqbur (Sendana), Daetta Melantoq (Banggae), Tomelakelake Bulawang (Pambawang), Puatta Dikarenamo (Tapalang), dan Tomejammeng (Mamuju). Pertemuan ini menghasilkan sebuah ikrar:

Marilah kita membulatkan tekad, dengan menderapkan langkah, mengayunkan tangan masing-masing, demi mencapai satu usaha untuk menegakan negara. [...]saling berusaha menciptakan kebaikan dan saling menghindarkan setiap kecelakaan. Hanyut saling merenangi, runtuh saling menegakkan, keliru saling memperingati. Di gunung ataupun di daratan rendah, persaudaraan di antara kita tidak akan pernah longgar (Saharuddin 1985, 36–37).

Semua pihak sepakat “pantang melepaskan perjanjian kesepakatan, jiwa boleh melayang tetapi perjanjian pantang diingkari” (*urupau pura loa, limbang nyawa tallallaq pura pau*) (Sjarifuddin, 1989: 281-282). Selanjutnya dipertegas dengan suatu sanksi bahwa “barang siapa yang melanggar ikrar bersama yang telah kita ucapkan, ibarat bumbungan dan tiang rumah dibalikkan ke bawah” (Disporabudpar 2010, 112). Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa Balanipa menjadi ketua dan Sendana adalah wakil, serta yang lain sebagai anggota. Apabila anggota persekutuan tidak mampu menyelesaikan permasalahannya maka diminta bantuan dari Balanipa dan Sendana untuk mencari solusi. Dua kerajaan itu dipandang sebagai ayah (Balanipa) dan ibu (Sendana) oleh empat kerajaan lainnya.

Upaya penyatuan Mandar pesisir terus digiatkan melalui pertemuan kedua di Tammajarra. Pada pertemuan ini peserta bertambah satu, yakni Kerajaan Binuang. Menurut sumber lokal, Binuang adalah hadiah dari Gowa kepada Balanipa karena membantunya mengalahkan Bone (Patunru 1983, 13). Gowa mendapatkan Binuang dari Raja Batulappa (Syah 1993, 47). Dari pertemuan ini lahir persekutuan tujuh kerajaan di muara (*Pitu Ba'bana Binanga*), selanjutnya disebut Mandar Pesisir. Setiap anggota memiliki dan saling menghargai otonomi dengan satu prinsip bahwa “di mana api menyala di situ pula dipadamkan”. Maksudnya adalah setiap kerajaan (1) tidak saling mencampuri hukum dan kebiasaan masing-masing, (2) bebas membicarakan urusan dalam negerinya, (3) tidak saling menyinggung kehormatan, dan (4) tidak melumpuhkan kekuatan satu sama lain (Sinrang 2000, 104).

Sementara itu, di pedalaman Mandar terbentuk persekutuan tujuh kerajaan di sekitar hulu sungai (*Pitu Ulunna Salu*), yaitu Tabulahan, Rantebulahan, Aralle, Mambi, Matangnga, Tabang, dan Bambang. Berdasarkan hasil musyawarah di antara mereka disepakati bahwa Tabulahan menjadi ibu negeri (*indo litaq*) dan yang lain sebagai anggota yang bertugas menjalankan fungsi masing-masing di bidang ekonomi, sosial, politik, dan keamanan (Poelinggomang 2012, 51–55). Oleh karena secara geografis tujuh kerajaan ini berada di pedalaman sehingga disebut Mandar pedalaman.

Raja Tomepayung menginisiasi penyatuan Mandar pesisir dan Mandar pedalaman. Empat belas raja bertemu di Luyo. Pihak pertama diwakili oleh Tomepayung (Raja Balanipa) dan pihak kedua oleh Londong Dahata (Raja Rantebulahan). Kedua belah pihak sepakat untuk saling menguatkan (*sipamandar*). Hasil perjanjian ini biasa

disebut Menanam Batu (*Allamung Batu*) di Luyo. Semua ancaman menjadi tanggung jawab bersama sesuai kedudukan dan arah datangnya ancaman, seperti tercermin dalam isi perjanjian berikut:

*Ulu Sallu mematta di sawa. Baqba Binanga mematta di pearappe anna mangiwang. Sisaraq pai mata malotong anna mapute, anna sisaraq Pitu Ulunna Salu Pitu Baqbana Binanga*

Terjemahan:

Ulunna Sallu mengawasi ular sawah. Baqba Binanga mengawasi tempat terdamparnya ikan hiu. Setelah terpisah mata hitam dengan mata putih, barulah berpisah Pitu Ulunna Salu dan Pitu Baqbana Binanga (Mandra 1987, 95–96)

Proses lahirnya persekutuan dan perjanjian di atas menunjukkan betapa pentingnya peran Balanipa sebagai kekuatan utama di seluruh Mandar. Kerajaan ini dilengkapi dengan sepuluh jabatan hadat (*sappulo sokko ada'*), yaitu (1) Pa'bicara Kaiyang, membantu raja di bidang hukum, memimpin sidang-sidang, pendamping tetap raja; (2) Pa'bicara Kenje, penghubung antara raja dan anggota hadat lainnya, pelaksana administrasi pemerintahan; (3) Papuangan Limboro, pengatur urusan pemerintahan di luar istana, termasuk amara'diang, ketua kaum hadat dan bertanggung jawab pada urusan dalam negeri; (4) Papuangan Biring Lembang, membantu Papuangan Limboro dalam urusan dalam negeri, juga pengamanan dari arah laut; (5) Papuangan Lambe', penghubung antaramara'diang Balanipa dengan amara'dia lainnya di luar Mandar dan Pitu Ulunna Salu; (6) Papuangan Koyang, pelaksana di bidang keuangan; (7) Papuangan Laka, penghubung antaramara'diang di Pitu Ba'bana Binanga; (8) Papuangan Rui, pelaksana urusan penerangan; (9) Papuangan Tenggelang, bertugas mengurus hutan dan pertanian, dan (10) Papuangan Luyo,

penghubung antara Balanipa, Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu (Rahman 1988, 271).

Raja Balanipa ketiga, Tonijallo, sangat memperhatikan masa depan persekutuan Mandar. Oleh karena itu, diadakan pertemuan guna memperkuat kembali perjanjian dan sumpah setia dari semua kerajaan di Mandar pesisir. "Sekali-kali janganlah kita saling bersilang pendapat sebab kita ini semua adalah satu sebagai keluarga bangsawan, kita mempunyai negeri yang satu, kita ini semua Mandar. Di mana api menyala, di situ juga padam", kata Tonijallo dalam pertemuan itu. Setelah dia meninggal, timbul konflik internal dalam istana antara Daetta Tommuane (putri Tonijallo dengan isteri Napo) dan Daetta Tobaine (putra Tomepayung dengan isteri Gowa). Persoalan ini dapat diselesaikan atas mediasi Raja Gowa. Hasilnya yang menjabat sebagai Raja Balanipa keempat adalah Daetta Tommuane (Disporabudpar 2010, 114–15; Rahman 1988, 245).

Guna memajukan perdagangan maritim, Daetta Tommuane Kakana I Pattang (memerintah 1615-1620) memindahkan seribu penduduk dari pedalaman Napo ke pesisir di bawah pimpinan I Puang di Koyang yang bergelar *papuangan* di pantai. Daetta sering mendapat kabar mengenai agama Islam dari pelaut Mandar yang datang dari Makassar, Jawa, dan Kalimantan di pelabuhan Balanipa (Rahman 1988, 246). Setelah tiga tahun memerintah, datanglah seorang ulama dari Mekkah, yakni Abdurrahim Kamaluddin (*Tosalama' di Binuang*) yang menumpang sebuah perahu *tobago*. Dia menggunakan tongkat besi untuk mendorong perahunya ketika melewati perairan dangkal. Dia berhasil mengislamkan Daetta bersama penduduk Balanipa, Napo, Samasundu, Mosso, dan Todangtodang. Sejak itulah agama Islam diterima secara resmi di Kerajaan Balanipa (Sewang 2012, 33–35).

Kehidupan keagamaan berjalan baik. Salat Jumat dilaksanakan di kerajaan. Penduduk dan pejabat kerajaan mengeluarkan zakat kemudian dibagikan kepada orang yang berhak, selain digunakan membangun masjid. Penduduk giat mengaji. Raja dan *To Salama* mengangkat empat puluh pengurus masjid. Mereka mendapatkan nafkah dari zakat fitrah dan biaya perkawinan. Kampung yang belum melaksanakan salat Jumat diberikan sepertiga dari zakat fitrah dalam kampung. Para guru agama bertugas mengumpulkan zakat fitrah di kampung masing-masing. Setelah salat Idulfitri, bersama pengurus masjid, mereka menyerahkan zakat fitrah kepada kadhi di Balanipa (Disporabudpar 2010, 120–22).

Agama Islam diterima oleh penduduk Banggae atas usaha Syekh Abdul Mannan dari Jawa Timur, yang datang melalui Makassar. Ia diterima oleh Raja Banggae, I Moro Daengta di Masigi. Awalnya dilakukan uji kesaktian. Apabila syekh dapat menghunus keris pusaka milik raja, maka raja dan rakyatnya bersedia menganut Islam. Ternyata usaha tersebut berhasil sehingga agama Islam diterima secara resmi di Kerajaan Banggae, yang ditandai dengan pengibaran bendera kebesaran *I Macang*. Bendera ini didesain dan dibuat langsung oleh Abdul Manan. Setelah ulama ini meninggal, ia dimakamkan di kawasan istana Bangge di Bukit Salabose. Penganjur Islam lain adalah Tosalama di Tuan Daeng, keturunan Melayu Makassar. Dia berdakwah di Arulele dan sekitarnya. Makamnya di pesisir, tepatnya Pangaliali (Ahmad & Nurjanah 2007, 73–74).

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa para ulama di Mandar datang lewat Makassar. Hubungan niaga antara Mandar dan Makassar memudahkan mereka tiba di Mandar dengan perahu para pedagang Mandar, Makassar, dan Bugis. Selain itu, pada awal abad XVII

Kerajaan Gowa-Tallo (Makassar) giat memperluas wilayah kekuasaan sekaligus menyiarkan agama Islam ke daerah lain. Baik secara kultural maupun kekuasaan, raja-raja di Mandar pesisir mempunyai kaitan kerabat dengan Gowa-Tallo. Semua membuka jalan bagi kemudahan syiar Islam di Mandar.

Puncak kemakmuran Mandar pada masa Raja Balanipa kelima, Todiboseang (1620-1632). Raja ini memiliki sebuah perahu perang *I Tandijo'jo* dengan empat tambatan. Menurut lontara *pattodioloang*, raja mempunyai empat perahu yang dicat indah dengan dua tiang layar (*dua battajanna lopinna*). Sumber lain, lontar *pattappingang*, menyebutkan bahwa raja mempunyai sebuah perahu *I Tandijoqjoq* dengan dua tambatan dan empat perahu lain selalu berlabuh. Keterangan ini punya kesamaan. Raja memiliki sebuah perahu perang *I Tandijo'joq* dan empat perahu lain. Perahu tersebut cukup besar sehingga diperlukan penduduk satu kampung untuk mengambil penambal perahu (*baruq*). Semua perahu itu, digunakan pada setiap ekspedisi kerajaan membawa pasukan khusus yang terdiri atas 80 orang penebas, 100 orang penyumpit, dan 80 orang penyerang (Sinrang 2000, 46).

Istana Balanipa dibangun dari tujuh petak berukir dan tiga baruga di bagian depan. Pandai emas di bagian selatan dan pandai besi di sisi utara. Di belakang istana terdapat penuang gelang, tukang perahu, pembuat tali, dan pengukir. Ada juga regu penari *pattuqduq*, yang dikenal dengan *Iwannebala*, meliputi tiga perangkat yang berasal dari keturunan raja (*maradia*), kaum adat (*puang*), dan rakyat. Jumlah setiap perang enam orang sehingga total delapan belas orang (Yasil, S. 1984, 222). Pada masa itu, datang seorang putra bangsawan Sidenreng (Batulappa), I Daeng di Parepare, bersama keluarga, dan pembantunya. Dia memperkenalkan diri kepada raja sebagai pandai emas yang dipelajari di negerinya. Oleh karena itulah,

dia diminta tinggal membuat perhiasan dari emas sebanyak mungkin, kemudian menikah dengan keluarga raja dan tinggal di Mandar (Syah 1993, 55–56). Kegiatan pengolahan besi cukup ramai sehingga dipekerjakan penduduk satu kampung untuk membakar arang, satu kampung sebagai pemikul, dan satu kampung yang mengambil air. Kebutuhan makanan disediakan oleh penduduk satu kampung menjadi penumbuk padi dan satu kampung sebagai pembawa kapak. Demikian pembagian kerja dan kesibukan penduduk yang mengabdikan kepada kerajaan (Disporabudpar 2010, 123–24).

Perluasan wilayah kekuasaan Mandar memicu terjadinya konflik dengan para penguasa di daerah perbatasan. Perluasan ke selatan sampai Sawitto (Lima Ajatapparang) menimbulkan konflik dengan Raja Batulappa. Raja ini mengadukan tindakan Raja Mandar kepada Sultan Gowa Alauddin. Sehari sebelum perang, Alauddin datang menengahi konflik antara kedua belah pihak dengan menentukan batas wilayah masing-masing. Bagian selatan sungai menjadi milik Ajatapparang dan bagian utara adalah milik Mandar. Sedangkan sungainya sendiri diambil oleh sultan, sehingga dikenal pula dengan sebutan *Binanga Karaeng* (sungai milik sultan). Dengan demikian, masalahnya dapat diatasi sehingga tidak terjadi perang. Binanga Karaeng (sekarang sungai Paku) menjadi batas wilayah Mandar (sekarang Provinsi Sulawesi Barat) dengan Sulawesi Selatan (Yasil 1984, 223; Hamid 2018, 4).

Perluasan wilayah ke utara sampai Kaili. Armada laut Mandar berangkat dengan angin musim timur (*timor pai tau, mendulu domai*) pada bulan Juli-September. Menurut lontar Mandar, Kaili dua kali diserang oleh Mandar. Pada serangan pertama, pasukan Sendana dan Taramanu tidak ikut menyerang. Berikut serangan kedua, semua pasukan Mandar menyerang di bawah pimpinan Raja Balanipa, Todiboseang. Pasukan Kaili

cukup kuat. Setelah beberapa bulan mereka berperang, kedua belah pihak bertemu mengadakan perjanjian damai di Lolomboju. Dalam perjanjian itu ditegaskan bahwa apabila Kaili berubah sikap maka dikenakan sanksi seribu manusia, seribu ekor kerbau, dan seribu ekor kambing. Tempat perundingan itu menjadi batas wilayah kekuasaan Mandar yang dibatasi di Sungai Suremana (Syah 1993, 30–37; Hamid 2018, 7–8).

Pada ekspedisi tersebut Todiboseang tidak membawa perahu perangnya, *I Tannijo'jo*. Tidak disangka ternyata pasukan Kaili sangat kuat sehingga sulit dikalahkan.<sup>5</sup> Dia rencana pulang ke Mandar, tetapi ditahan oleh raja Banggae, Tomatindo di Boro'bo. Setelah giat berjuang, mereka pun berhasil mengalahkan Kaili. Sebagian orang Mandar tinggal di sana. Puang Limboro menikah dengan seorang perempuan Kaili yang dibawanya pulang ke Mandar. Raja-raja Mandar lain kembali ke negerinya, kecuali Raja Balanipa. Dia sakit dan meninggal di Kaili tahun 1632. Mayatnya dibawa ke Mandar dengan perahu, sehingga raja ini disebut sebagai *Todiboseang* atau orang yang didayungkan (Yasil 1984, 67–69; Syah 1993, 69–69).

Ekspedisi Mandar ke Kaili, dalam sejarah Sulawesi Tengah, disebut *Oorlog met de To Mene* (perang dengan orang Mandar). Ada tiga sebab perang ini terjadi. *Pertama*, pembantaian kerbau oleh penduduk Tamotoempoe (Dolo). Menurut cerita rakyat, Raja Palu memiliki seekor kerbau cantik, *Goa Goa*, dengan tanduk yang panjang. Ketika mencari makan di kedua tepi sungai, Sampoe

<sup>5</sup> Semua orang Mandar pada tujuh perahu dalam menyerang ini dibunuh oleh orang Sigi-Tawaili. Setelah mengetahui kabar buruk itu, pangeran Mandar mengumpulkan banyak penduduk dari tujuh muara sungai (*7 bamba binanga*). Melihat banyak pasukan yang datang, orang Kaili memutuskan tidak berperang dan membayar budak dan emas. Namun demikian, pasukan Mandar meneruskan ekspedisi ke pedalaman, yakni Kulawi, Napo, dan Besoa (Kruyt 1938, 57).

memotong dan membagikan dagingnya kepada penduduk. Tiga hari kemudian orang Palu menyerang Tamotoempoe namun tidak berhasil. Dengan bantuan orang Mandar, Sampoeji dibunuh oleh orang Palu. *Kedua*, konflik pribadi Pangeran Mandar Djampalila dengan pangeran Dolo Tanamoro. Pada suatu pesta Tanamoro bermain kuda dengan lincah yang menarik perhatian istri Djampalila, Dae Ndaja. Hal itu membuat Pangeran Mandar marah kepada Pangeran Dolo. Pada waktu lain, saudara dari Tanamoro, Kedjo, membawa sebuah tiang rumah adat yang berat dilihat Dae Ndaja yang membuat istri Pangeran Mandar itu jatuh cinta kepadanya. Pangeran Mandar membujuk orang Palu, Biromaru, dan Sigi secara bersamaan menyerang Dolo. *Ketiga*, kebencian orang Mandar terhadap penduduk di Lembah Palu karena mengambil beras dan membunuh kerbau mereka. Yang tersisa hanya tujuh puluh ekor kerbau. Orang Kaili mengikat *ijuk* di ekor kerbau lalu membakarnya. Binatang itu lari ke kamp musuh sehingga orang-orang di sana berlari ke segala arah. Dalam situasi ini orang Kaili menyerang Mandar. Dari tiga sebab itu jelas bahwa orang Mandar telah tinggal di Lembah Palu. Kehadiran mereka dianggap saingan bagi orang Kaili. Karena pembunuhan kerbau, kecemburuan sosial, dan penguasaan tanah terjadi perang Kaili melawan Mandar (Kruyt 1938, 78–79).

Pengaruh Mandar sampai di pantai timur dan barat Teluk Tomini. Para Raja Kasimbar, Toribulu, dan Moutong berasal dari keturunan Mandar. Sebelum kedatangan Mandar, Kerajaan Sigi berkuasa sampai Teluk Tomini. Kemudian datang ekspedisi dari Mandar yang dipimpin tiga bersaudara, yakni Toniwosea, Magau Junggu, dan Puetta Karikaci. Tokoh terakhir meneruskan ekspedisi di Teluk Tomini. Dia menikah dengan penduduk setempat dan menjadi raja di Kasimbar. Cucunya, Pua Woli, kawin dengan Sappewali, bangsawan dari Mandar.

Sappewali kemudian menjadi raja di Toribulu. Sementara Kerajaan Moutong, bermula dari kerajaan tua di Lambunu. Dikisahkan bahwa seorang bangsawan Mandar, Nae, menitipkan (*moutong* dalam bahasa Mandar) putranya, Manggalatung, kepada raja setempat. Setelah anak itu dewasa, dengan bantuan ayahnya, mendirikan kerajaan dan menjadi raja pertama Moutong (Depdikbud 1997, 45–49; Kruyt 1938, 57).

Pengaruh Mandar di Sulawesi Tengah tampak pada penggunaan gelar *pue* dan *puang* oleh bangsawan lokal (Depdikbud 1997, 48). Dalam sistem budaya Mandar, kata *puang* untuk bangsawan dari kaum adat, sedangkan keturunan raja disebut *daeng*. Pengaruh lain pada nama unit bahari (teluk) yang dikaitkan kehadiran orang Mandar. Mereka dikenal dengan *To Mene* (*to*=orang, *mene*=Mandar). Raja-raja di kawasan Teluk Tomini berasal dari keturunan Mandar. Satu kerajaan penting di Teluk Tomini, Gorontalo, sebelumnya dikuasai Mandar, kemudian diserahkan kepada Sultan Gowa Alauddin tahun 1638 (Kamaruddin et al 1986, 99). Atas dasar itu diduga kata *To Mene* kemudian berubah menjadi Tomini.

### **Eksistensi Mandar Ketika dan Setelah Perang Makassar**

Menurut Cornelis J. Speelman, orang Mandar adalah di antara yang paling ditakuti dalam kekuatan Makassar, mempunyai banyak senjata, pencari jejak yang hebat, dan ahli sumpit beracun (Andaya 2004, 96–97). Seribu pasukan Mandar dipimpin Raja Balanipa menuju Buton bersama pasukan gabungan Makassar di bawah komando panglima perang Karaeng Bontomarannu. Pasukan Makassar sekitar 20.000 orang menggunakan 700 perahu. Armada tersebut meninggalkan pantai Makassar pada 23 Oktober 1666 untuk mengepung Buton. Akhir Desember, 60 perahu yang membawa

1.500 pasukan dipimpin Daeng Mangangka menduduki Kalingsusu, Buton bagian utara. Sementara itu, Karaeng Bontomarannu mendarat dari jurusan barat (Patunru 1983, 46; Andaya 2004, 95).

Pada 1 Januari 1667, pasukan Belanda yang dipimpin Speelman tiba di Buton. Mereka sebelumnya bertempur dengan pasukan Makassar di perairan Bantaeng. Pasukan itu terdiri atas 500 orang Belanda dan 300 orang pribumi. Pasukan pribumi Bugis dipimpin Arung Palakka dan pasukan Ambon oleh Jongker (Ligtvoet 1878, 51). Setelah dua hari berperang, para pemimpin pasukan Makassar berhasil ditahan oleh Belanda. Mereka adalah Karaeng Bontomarannu (panglima), Sultan Bima Abil Khair Sirajuddin (wakil panglima), Datuk Luwu Settiraja, dua Raja Mandar (Tomatindu di Buttu dan Daeng Riosok), seorang putra dan dua saudara Karaeng Bontomarannu. Pada 4 Januari 1667, komandan pasukan Makassar menyerah kepada Speelman (Stapel 1922, 112; Patunru 1983, 46–47).

Di antara 10.000 orang ditawan oleh Speelman itu terdapat 5.000 orang Bugis diserahkan kepada Arung Palakka, 200 orang Buton dikembalikan kepada Sultan Buton, 400 orang dijadikan budak VOC-Belanda, dan sisanya ditahan di sebuah pulau kecil di Selat Buton (Ligtvoet 1878, 52–53; Patunru 1983, 47). Pulau itu disebut oleh Speelman sebagai Pulau Sang Pemenang (*Overwinaars Eiland*). Para tawanan hanya sedikit diberi makanan, sehingga mereka menderita kelaparan dan mati. Itulah sebabnya pulau tersebut juga dikenal dengan Pekuburan Makassar (*Makassarsche Kerkhof*). Masyarakat Buton sendiri menyebutnya Pulau Makasar (*Liwuto Makasu*) (Zuhdi 2018, 145; Hamid 2008, 69–70). Nama yang terakhir dikenal sampai sekarang dengan singkatan Puma (Pulau Makassar). Dari 330 perahu yang dirampas, sebanyak 200 buah dihancurkan, 34 perahu diambil oleh Buton, 10 perahu terbaik diambil

Arung Palakka, dan 86 yang merupakan perahu Bugis digunakan oleh pasukan Arung Palakka. Selain itu disita 800 ton beras yang sangat putih. Di antara pasukan yang dilucuti adalah 195 panji, 50 di antaranya dikirim ke Batavia, bersama senjata dalam jumlah besar dan berkualitas tinggi (Stapel 1922, 111–12; Andaya 2004, 97).

Keberanian orang Mandar dalam perang melawan Belanda dan sekutunya di perairan Buton digambarkan dengan baik oleh juru tulis Sultan Hasanuddin (1653-1669), Enci Amin, dalam *Syair Perang Mengkasar* yang ditulis antara Juli 1669 dan Juni 1670 (Amin and Skinner 2008, 89–90), sebagai berikut:

[113] Mara'dia itu tiada menurut kata  
masuk menutup pintu kota  
Bugis kutuk Welanda yang dusta  
patutlah lawan kepada kita

[116] Setelah habis sekalian senjata  
Mandar ta' mau menurut kata  
mana kehendaknya Welanda yang dusta  
barang hukumannya adalah kita

[120] Bertitahlah Raja Bala' Nipah  
menyuruh mengganti dayung yang patah  
semuanya kafir seperti perintah  
menantikan rajanya bertitah

[122] Mara'dia itu raja yang terbilang  
membelah dengan serunai genderang  
keris dan seunderik tersisip di pinggang  
setinggi pun hadir sepucuk orang

[122] Hendak mengambat si Tunderu'  
melarang  
Mandar itu biarlah pulang  
kehendak hatinya berkata garang  
Mandar kutuk anak jembalang

[124] Mandar itu raja yang keras  
sehari semalam dia pun lepas  
barang yang tinggal disuruhnya rampas  
habis menjelus tinggal menjelas

Sehari setelah ditangkap, Raja Balanipa Tomatindo di Buttu berhasil

meloloskan diri dari Pulau Makassar dengan dua perahu di bawah lindungan kegelapan malam. Oleh karena tindakan itu, Belanda memperlakukan para bangsawan Mandar dan 80 pasukannya sama seperti tawanan orang Makassar. Setengah dari tentara tersebut dijadikan budak dan sisanya ditinggalkan di Pulau Makassar (Stapel 1922, 110; Andaya 2004, 97). Namun setelah Speelman berlayar meninggalkan Pulau Buton menuju Kepulauan Maluku, Sultan Buton La Simbata (1664-1669) membebaskan para tawanan tersebut dan ada juga yang memilih tetap tinggal di sana (Zuhdi 2018, 145).

Pasukan Mandar kembali ke Mandar dan mempersiapkan kekuatan untuk membantu Makassar. Pada awal Agustus 1667, armada Mandar meninggalkan pantai Mandar menuju Makassar. Perahu Raja Balanipa pertama kali tiba di pantai Galesong. Perahu ini dijaga oleh 80 pasukan gadah besi. Kehadirannya mendapat perhatian dari Arung Palakka. Pemimpin pasukan Bugis ini kemudian menemui Raja Balanipa, pada hari kedua di perahunya, untuk mengajaknya bersekutu. Pertemuan ini digambarkan dalam sumber lokal Mandar berikut:

Setelah bertemu raja Balanipa di atas perahu, Arung Palakka berkata kepada raja Balanipa: “beritahu saya apa yang engkau inginkan sebab sepuluh kali saya mengharapkan keinginanmu itu”. Dijawab oleh Arung Palakka” “marilah kita mengangkat, senjata apakah yang di atas perahumu”. Selanjutnya arung Palakka berkata lagi: “saya memiliki senapan, setiap kali meletus pelurunya mengenai hati dan saya juga memiliki senapan inti yang setiap kali meletus pelurunya pasti mengenai pas di jantung”. Lebih lanjut Arung Palakka berkata: “senjata pembunuh apakah yang ada di atas perahumu”. Dijawab oleh raja Balanipa: *I Potte* [sejenis senjata]

yang bernama *I Balu Baine*, setiap kali mengenai sasaran [maka] isterinya menjadi janda”. Berkata Arung Palakka: “mulutmu yang dikena jika saya tidak membenarkan atau tidak menepati apa yang anda katakan”. Telah menjadi permufakatan, ikrar dan sumpah antara raja Balanipa dengan Arung Palakka (Disporabudpar 2010, 126–27).

Perahu Raja-Raja Mandar lain kemudian tiba dan bergabung dengan Raja Balanipa di pantai Galesong. Buttut mengajak raja-raja tersebut bertemu dengan Arung Palakka, tetapi mereka menolak karena yang mengundangnya adalah Raja Gowa, bukan Arung Palakka. Sebagaimana ikrar pendahu mereka, yakni I Manyambungi dengan Raja Gowa pada abad XV, bahwa “Besok lusa, bila Gowa dalam keadaan bahaya, hendaklah engkau [Mandar] datang membantu, kecuali jika bahaya tersebut hanya dalam negeri [Gowa] saja” (Rahman 1988, 211). Pada hari ketiga, Arung Palakka menemui Raja Balanipa di perahunya untuk memastikan sikap Raja-Raja Mandar. Ternyata sikapnya sudah berubah, setelah bermusyawarah dengan raja-raja lain, yakni tetap mendukung pihak Makassar. Arung Palakka akhirnya pergi dengan perahu kecil yang didayung dua orang dewasa dan seorang anak kecil, sembari memberi isyarat bahwa mereka akan bertemu di medan perang (Disporabudpar 2010, 127–28).

Pasukan Mandar sangat gigih melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Poolman dan Arung Palakka di pantai Galesong. Pada 19 Agustus 1667, berkobar perang antara kedua belah pihak. Pertempuran berlangsung dengan hebat. Empat hari kemudian, karena pasukan Belanda lebih kuat, Benteng Galesong berhasil direbut dan dikuasai Belanda. Banyak korban akibat perang ini (Patunru 1983, 50; Amin and Skinner 2008, 70). Raja Balanipa (Daeng

Mabbani) terkena tembakan di lehernya dan akhirnya meninggal dunia di pantai Galesong. Karena itu dia dikenal dengan *Todiposso di Galesong*. Mayatnya dibawa pulang ke Mandar dengan perahu dan dimakamkan di sebuah gunung (buttu) sehingga dikenal juga *Tomatindo di Buttu* (Syah 1993, 75–77). Setelah raja itu meninggal, pasukan Mandar dipimpin oleh panglima perang Mangga Daeng Riosok.

Pasukan Belanda dan Bone dari Galesong menuju pantai Barombong. Pada dini hari, 23 Oktober, Benteng Kerajaan Gowa di Barombong dapat dikuasai oleh Arung Palakka. Untuk mencegah banyak koban akibat perang, juga desakan Speelman, Sultan Hasanuddin bersedia untuk berunding di Bungaya, dekat Barombong. Setelah beberapa hari berunding akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan di Bungaya 18 November 1667. Sesuai kesepakatan ini, Gowa harus melepaskan haknya atas Mandar dan tidak lagi membantu mereka dengan tenaga manusia, senjata, dan lainnya (Patunru 1983, 50–51; Andaya 2004, 387).

Menurut Andaya (2004, 311), Mandar merupakan sebuah konfederasi yang keras dan merdeka. Meskipun sudah berulang kali diserang dan dipaksa mengakui kekuasaan Belanda dan Arung Palakka, mereka tidak pernah tunduk. Mandar tidak mengindahkan larangan berlayar dari Belanda, sebagaimana perjanjian Bungayya (pasal 9), bahwa pemerintah dan rakyat Makassar tidak boleh berlayar ke mana pun. Yang dimaksud dengan “Rakyat Makassar” adalah sekutu-sekutu Makassar dalam perang Makassar, termasuk Mandar. Bahkan, Mandar menyediakan pelabuhannya sebagai alternatif bagi kegiatan perdagangan internasional dan tempat pelarian dari para pemimpin Makassar, Melayu, dan Bima.

Padatahun 1669, Karaeng Bontomarannu muncul bersama kemenakannya, Opu

Cenning,<sup>6</sup> di antara perahu-perahu dengan 1.000 orang Mandar di Ujung Lero. Kedua tokoh itu bersembunyi di Sendana. Pada tahun 1671, Belanda mengirim utusan untuk menangkap mereka, tetapi tidak berhasil. Raja Tallo Karaeng Karunrung dan 200 pengikutnya menggunakan sembilan perahu berlayar dari Tallo menuju Mandar. Awalnya rencana ke Pasir, Kalimantan Timur, namun keterbatasan air dan angin kencang di Selat Makassar sehingga perahunya putar haluan ke Binuang dan kemudian ke Tallo atas persetujuan Belanda di Barru. Orang-orang Melayu hijrah ke Mandar, selain Pasir, Bima, dan tempat-tempat lain (Andaya 2004, 154, 263).

Pimpinan pasukan Bima, Sultan Abil Khair Sirajuddin (1640-1682), ketika hijrah di Mandar, membuat suatu perjanjian dengan Raja Balanipa (Daeng Riosok) pada 27 November 1667. Isi perjanjian itu tercatat dalam *Bo' Sangaji Kai* (Catatan Kerajaan Bima):

Ini pasal pada menyatakan perjanjian Yang Dipertuan Kita Raja Bima dengan Raja Balanipa. Ia Bima, ia Balanipa, jika orang Mandar datang ke Bima, datang ke rumahnya, datang kepada makan[nya]. Demikian lagi orang Bima jika datang ke Mandar, datang ke rumahnya, datang kepada makanannya. Musuhnya Mandar musuhnya Bima. ...Barang siapa melupakan kata ini dikutuk Allah dan rasul-Nya (Chambert-Loir and S M R Salahuddin 1999, 118–19).

Dibandingkan dengan sekutu lain, tampaknya hubungan Mandar dan Bima sangat penting dan (merujuk perjanjian di atas) harus dijaga supaya tidak dikutuk oleh Allah dan Rasul-Nya. Sikap Raja Balanipa

<sup>6</sup> Putra mahkota Luwu. Setelah ditangkap dan diasingkan ke Batavia, dia melarikan diri ke Banten November 1668. Awal tahun 1669, dia kembali ke Makassar melalui Semarang, lalu hijrah ke Mandar bersama pamannya, Karaeng Bontomarannu (Andaya, 2004: 263).

dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya bersekutu dalam perang, tetapi juga karena adanya ikatan kerabat lama. Menurut sejarah Mandar, seorang putri I Manyambungi dari isterinya Karaeng Suria menikah ke Bima (Saharuddin 1985, 43) pada paruh pertama abad XVI. Mandar dan Bima pun memiliki ikatan erat dengan Makassar. Sebelum mendirikan kerajaan dan menjadi raja, Manyambunyi meniti karir di Kerajaan Gowa. Begitu pula ayah Sultan Bima II, Abdul Kahir, belajar di istana Gowa sebelum menjadi sultan pertama Bima (1621-1640).

Raja-Raja Mandar jelas menolak menyerahkan orang-orang yang hijrah ke negerinya. Sikap tersebut menghawatirkan Belanda, karena mereka dapat meninggalkan Sulawesi dan mencari perlindungan dari penguasa Islam lain di Nusantara. Mereka menjadi ancaman bagi kerajaan-kerajaan yang lemah di pesisir dan pemasok tenaga manusia yang siap pakai bagi mereka yang menjadikan pelayaran antarpulau sebagai sumber keuntungan, petualangan atau pembalasan dendam (Andaya 2004, 177, 195). Akibat sikap tersebut, pasukan gabungan Belanda dan Bone di bawah pimpinan oleh Arung Palakka menyerang Mandar.

Serangan pertama pada 6 Oktober-15 November 1671 cukup kuat sehinggamembuat pasukan Mandar mundur ke pedalaman untuk bertahan dan kembali lagi ke pesisir setelah pasukan musuh meninggalkan pantai Mandar dengan angin musim barat (Leyds 1940, 37; Kamaruddin et al 1986, 141). Penyerangan ini mengikuti arah angin musim, seperti dilansir dalam lontar Mandar bahwa pada musim barat peperangan dihentikan, musim timur peperangan kembali dilanjutkan (*Bara' me'osa bomi mammusu timori pole bomi*) (Disporabudpar, 2010: 23). Hal itu lebih tepat disebut sebagai perang angin buritan. Angin buritan (Timur) mengantar perahu mereka tiba di Mandar dan angin buritan (Barat) pula yang menggerakkan perahu mereka kembali

ke Makassar. Saat tiba di Makassar, mereka disambut dengan gembira sebagai para penakluk (Andaya 2004, 178).

Serangan kedua terjadi pada dua musim timur berikutnya. Pasukan gabungan Belanda dan Bone meninggalkan Makassar menuju Mandar pada 31 Oktober 1673 di bawah pimpinan Arung Palakka (Kamaruddin dkk, 1986: 146). Awalnya Arung Palakka mengirim empat utusan guna membujuk Raja Balanipa, sebagai ketua persekutuan Mandar, untuk bersekutu dengan mereka. Untuk meyakinkan Mandar, utusan tersebut menyampaikan pula berita bahwa Raja Gowa telah kalah perang melawan Belanda dan sekutunya. Namun Raja Balanipa tidak percaya dengan berita itu dan tidak mau bersekutu dengan mereka. Setelah utusan itu pulang, Arung Palakka kemudian melancarkan serangan terhadap negeri-negeri Mandar (Leyds 1940, 37).

Pasukan Mandar yang dipimpin Daeng Rioso dan To Matindo di Sallombo (Raja Banggae) berusaha menahan serangan yang datang dari laut. Oleh karena kekuatan yang tidak seimbang, rakyat Mandar pun terdesak ke pedalaman (Napo). Pemukiman penduduk di pantai Soreang (Batulaja) dibakar, sehingga kampung itu kemudian dikenal dengan nama *Kande Api* atau kampung yang dimakan api (Yasil, S. 1984, 229). Kebun-kebun dan pemukiman penduduk Napo, Samasundu, Majene, Bukko, Campalagian, dan Binuang dibakar oleh pasukan Arung Palakka. Tiga pemimpin rakyat Mandar, yakni Raja Banggae, Papuangan Lambe, dan Papuangan Kuyo, gugur dalam pertempuran di Malaujang (Disporabudpar 2010, 130–31).

Setelah mempersiapkan pasukannya, Daeng Riosok menyerang balik Arung Palakka. Dalam lontar Mandar disebutkan bahwa dia naik ke atas perahu Bone dan memotong tali sauhnya. Arung Palakka hampir terbunuh. Pasukan Bone hanyut bersama dengan perahunya. Demi menyelamatkan diri, Arung Palakka menyuruh seorang

Makassar memperlihatkan bendera Kerajaan Gowa (*Cinde Sulengkana*) dan Kerajaan Tallo (*Macakkek Borik*). Setelah melihat dua bendera tersebut, pasukan Mandar menghentikan serangan. Armada Belanda dan Bone terpaksa putar haluan meninggalkan pantai Mandar kembali ke Makassar (Yasil, S. 1984, 230; Sinrang 2000, 56).

Belajar dari dua pengalaman sebelumnya, pasukan gabungan Belanda dan Bone mempersiapkan diri lebih baik untuk kembali menyerang Mandar. Bila pada serangan kedua pasukannya hanya dipimpin oleh Arung Palakka, maka pada serangan ketiga ini (11 September–3 Oktober 1674), ikut pula tiga tokoh lain, yaitu Karaeng Palembang (Mamu), Karaeng Manjalling, dan Karaeng Bontopakdinging. Serangan ini dirancang sebagai perang terakhir terhadap Mandar sehingga waktunya lebih lama (53 hari) dari serangan pertama dan kedua (Kamaruddin et al 1986, 149). Pasukan Mandar dipimpin oleh Daeng Rioso berupaya untuk menahan serangan Arung Palakka. Namun, ternyata pasukan musuh lebih kuat. Taktik memperlihatkan bendera Gowa dan Tallo serta orang Makassar di antara pasukan tersebut ketika serangan kedua (1673) cukup mempengaruhi semangat perang pasukan Mandar karena seolah-olah mereka sedang berperang melawan sekutunya, Gowa dan Tallo.

Demi menghindari semakin banyak korban akibat perang, pemimpin dari kedua belah pihak akhirnya bertemu di Lanrisang pada 23 September 1674. Mereka sepakat untuk menghentikan perang dan berjanji untuk saling percaya. “Perkataan orang Bone dipercaya orang Mandar, perkataan orang Mandar dipercaya orang Bone” (*Makkedai Bone namateppek menrek, makkedai menrek namateppek Bone*), demikian ikrar mereka. Sejak itulah hubungan Mandar dan Bone pun dilukiskan sebagai sekerabat (*seajing*) (Syah 1993, 84; Sjafruddin 1989, 342). Ini tentunya

adalah suatu pencapaian penting bagi Arung Palakka yang sudah lama berusaha untuk menancapkan pengaruhnya di konfederasi yang paling keras dan merdeka itu (Andaya 2004, 311). Raja-Raja Mandar kemudian berangkat ke Benteng Rotterdam di Ujung Pandang. Pada 11 Oktober 1674, di atas Al-Qur’an mereka bersumpah bahwa akan menjunjung tinggi seluruh pasal Perjanjian Bungayya.

Setelah itu Arung Palakka atas bantuan Mandar berhasil menangkap Todani Arung Bekke, pemimpin utama Ajattappareng, yang telah berani menantanginya. Todani dihukum mati di Pulau Salemo pada 13 Februari 1681 (Andaya 2004, 196, 296–97). Di pulau itu, Mandar dan Bone membuat ikrar bersama bahwa “Bone di Barat, Mandar di Timur; Mandar di Barat, Bone di Timur” (*Bone uraik, Menrek alauk; Menrek uraik, Bone alauk*). Selanjutnya ditegaskan, “Barang siapa yang mengatakan Bone dan Mandar berselish, walaupun dalam mimpi, kita bedah perutnya, kita bunuh.” Dari perjanjian ini tampak kedudukan Mandar adalah sekerabat sama besar (*seajing senraja*) dengan Bone (Sjafruddin 1989, 348–50).

Hubungan antara Mandar dan Bone dipererat melalui perkawinan. Putri Raja Bone La Patau menikah dengan Raja Balanipa (Daeng Manguju Tomatindo di Lanrisang) sehingga melahirkan Besse Sompung. Putri mereka kemudian menjadi permaisuri Raja Balanipa (Tomappelei Pattujunna). Setelah isterinya wafat, Pattujunna menikah lagi dengan putri Arung Batupute (cucu Tomarilalang Bone) sehingga lahirlah I Sae Battupute, kelak menikah dengan Raja Balanipa Tomattole Ganranna (Saharuddin 1985, 51–52). Cara ini dipandang efektif untuk mengurangi efek dendam pascaperang Makassar antara Mandar dan Bone.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa proses kebangkitan Mandar memperlihatkan pola penyatuan unsur daratan (tanah) dan lautan (air). Unsur pertama direpresentasikan lewat kehadiran Tunipanurung dan I Pongkapadang, sedangkan unsur kedua lewat tokoh Tokombong di Bura dan Turijene. Dari keturunan mereka terbentuk persekutuan tujuh kerajaan pedalaman dan tujuh kerajaan pesisir. Dari penyatuan itu lahir konsep *sipamadar* (saling menguatkan), yang wilayahnya menjadi acuan batas administratif pada masa kolonial (Afdeling Mandar) dan kemerdekaan (Kabupaten Mandar) sampai Provinsi Sulawesi Barat.

Setelah perpindahan penduduk dari Hulu Saddang, terbentuklah persekutuan dari unit-unit politik kecil (*tomakaka*) kemudian bergabung (beberapa *tomakaka*) dan akhirnya menjadi kerajaan. Proses tersebut diwarnai konflik antara unit-unit politik yang pada gilirannya mempercepat pembentukan persekutuan. Semakin besar ancaman dari pihak seteru, semakin besar pula peluang persekutuan unit politik kecil menjadi unit politik yang lebih besar. Ancaman Passokkorang melahirkan Kerajaan Balanipa dan karena ancaman itu pula terbentuk persekutuan tujuh kerajaan pesisir, yang kemudian bersekutu dengan tujuh kerajaan pedalaman sehingga melahirkan konfederasi Mandar. Seiring kemajuan Mandar, dinamika sekutu dan seteru juga berkembang. Mandar memperluas wilayahnya ke selatan sampai Sungai Paku, berbatasan dengan wilayah Bugis (Batulappa), dan ke utara sampai daerah Kaili (Banawa) di Sungai Suremana, bahkan Teluk Tomini.

Hubungan Mandar dengan Makassar membawanya dalam arus perubahan kekuasaan. Sebelum perang Makassar, Mandar mengalami kemajuan pesat sebagai *collecting centre* bagi pelabuhan Makassar

dan merupakan sekutu setia Makassar. Pada saat yang sama Mandar menjadi seteru Belanda, Bone, dan sekutunya. Reputasi pasukan Mandar, di antara pasukan gabungan Makassar, sangat dipuji oleh panglima pasukan Belanda, Cornelis J. Speelman. Oleh karena itu, lewat Arung Palakka, Belanda berupaya mempengaruhi Mandar agar menjadi sekutunya, namun tidak berhasil. Mandar tetap mendukung Makassar dalam perang tersebut. Akhirnya, karena sekutunya kalah perang, Mandar menjadi sasaran serangan Belanda. Tujuh tahun setelah perang tersebut, barulah Mandar mengakui kekuasaan Belanda dan tujuh tahun berikutnya menjadi sekerabat dengan Bone. Upaya penyatuan kembali antara kedua belah pihak dilakukan lewat perkawinan antara bangsawan Mandar dengan Bone.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, E., and C. Skinner. 2008. *Syair Perang Mengkasar*. Makassar: Innawa.
- Amir, M., and Sahajuddin. 2011. *Konfederasi Mandar: Kajian Sejarah Persekutuan Antar Kerajaan Di Sulawesi Barat*. Makassar: Dian Istana.
- Andaya, L.Y. 2004. *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17, Diterjemahkan Oleh N. Sirimorok*. Makassar: Innawa.
- Bahtiar. 2016. "Hubungan Bone Dengan Mandar: Dari Sekutu Menjadi Seteru." *Walusuji* 7 (2): 417–32.
- Buijs, Kees. 2009. *Kuasa Berkat Dari Belantara Dan Langit: Struktur Dan Transformasi Orang Toraja Di Mamasa Sulawesi Barat, Diterjemahkan Oleh R. Arulangi*. Makassar: Innawa.
- Chambert-Loir, H., and S M R Salahuddin. 1999. *Bo'Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Cummings, William P. 2015. *Penciptaan Sejarah Makassar Di Awal Era*

- Modern, Diterjemahkan Oleh W. Jusuf.* Yogyakarta: Yogyakarta: Ombak.
- Depdikbud. 1997. *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah.* Palu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Disporabudpar. 2010. *Lontar Mandar.* Majene: Disporabudpar.
- Hamid, Abd. Rahman. 2008. *Jejak Arung Palakka Di Negeri Buton.* Makassar: Pustaka Refleksi.
- Hamid, Abd Rahman. 2018. "Dari Paku Sampai Suremana: Sejarah Batas Selatan Dan Utara Mandar." *Pangadereng* 4: 1–12.
- Hamid, Abd Rahman, and M. Saleh Madjid. 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah.* Yogyakarta: Ombak.
- Heng, L. S. 1990. "Collecting Centres, Feeder Points and Entrepot." In *The Southeast Asian Port and Polity: Rise and Demise*, edited by J and J. Villers K-Wels, 17–38. Singapore: Singapore University Press.
- Kamaruddinet all. 1986. *Lontarak Bilang Raja Gowa Dan Tallok.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kruyt, A.C. 1938. *De West-Toradjas Op Midden-Celebes Deel I.* Amsterdam: Uitgevers-Maatchappij.
- Leyds, W.J. 1940. "Memorie van Overgave Assistent van Mandar." Leiden: KITLV.
- Ligtvoet, Albertus. 1878. "Beschrijving En Geschiedenis van Boeton." *BKI* 26: 1–112.
- Mahmud, M.I., and At All. 2019. *Kebudayaan Kalumpang Sulawesi Barat 3800 BP-400 AD.* Makassar: Balai Arkeologi Sulawesi Selatan.
- Mandra, A.M. 1987. *Beberapa Perjanjian Dan Hukum Tradisi Mandar.* Majene: Yayasan Saq-adawang.
- Manyambeang, A.K., and A.R. Mone. 1979. *Lontarak Patturioloang Tutaloka.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mattulada. 2011. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah.* Yogyakarta: Ombak.
- Nurjanah, and Ahmad. 2007. *Sejarah Kebudayaan Mandar Jilid 1.* Majene: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Patunru, A.R.D. 1983. *Sejarah Gowa.* Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Pires, Tomé. 1944. *The Suma Oriental and the Book of Francisco Rodrigues, Edited and Translated by Armando Cortesão.* London: the Hakluyt Society.
- Poelinggong, E. L. 2012. *Sejarah Dan Budaya Sulawesi Barat.* Makassar: De La Macca.
- Rahim, A., and Borahima. 1974. *Sejarah Kerajaan Tallo': Suatu Transkripsi Lontara'.* Ujung Pandang: Kantor Cabang II Lembaga Sejarah dan Antropologi.
- Rahman, D.M. 1988. "Puang Dan Daeng: Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa-Mandar." Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Reid, Anthony. 2004. *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara, Diterjemahkan Oleh S. Siregar Dkk.* Jakarta: LP3ES.
- Saharuddin. 1985. *Mengenal Pitu Babana Binanga Mandar Dalam Lintasan Sejarah Pemerintahan Daerah Di Sulawesi Selatan.* Ujung Pandang: Mallomo Karya.
- Sewang, Ahmad M. 2012. *Kebangkitan Rahasia Islam Muda (KRIS MUDA): Studi Tentang Peran Islam Dalam Kelasykaran Di Sulawesi Barat.* Makassar: Alauddin University Press.
- Sinrang, A.S. 2000. *Lontara Pamboang.* Majene: Tanpa Penerbit.
- Sjafruddin, A. 1989. "Perjanjian Antarkerajaan Menurut Lontarak: Mengungkap Salah Satu Aspek Dalam Sejarah Hukum Adat Abad XV-XVIII

- Di Sulawesi Selatan.” Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Stapel, Frederik Willem. 1922. *Het Bongaais Verdrag*. JB Wolter’s uitgevermaatschappij.
- Syah, M.T.A. 1980. *Ceritera I Muttia Di Pa’sokkoran Litaq Mandar*. Ujung Pandang: BPSB.
- . 1993. *Lontarak Pattodioloang Di Mandar (Jilid 2)*. Ujung Pandang: Taruna Remaja.
- Wolhoff, G. J., and Abdurrahim. 1956. *Sedjarah Gowa*. Makassar: Jajasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- Yasil, S., and at all. 1984. *Lontara Pattappingang*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zuhdi, Susanto. 2018. *Sejarah Buton Yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.